

VAKSINASI MASIF

Volume Penumpang Udara Domestik Bisa Pulih 2022

Oleh **Thresa Sandra Desfika**

► **JAKARTA** - Pemulihan volume penumpang penerbangan domestik diperkirakan terjadi lebih cepat, yakni pada Desember 2022, jika proses vaksinasi dilakukan dengan skala dua kali lebih masif dibanding sekarang disertai komitmen penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh maskapai. Hal itu terungkap dari hasil riset Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Universitas Padjajaran (Unpad).

“Skema optimistis, *rebound*-nya lebih cepat dibandingkan kondisi normal sebanyak 79,02 juta penumpang, itu akan dicapai pada 2022,” kata Tim Riset INACA-Unpad sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Yayan Satyakti dalam Webinar *INACA White Paper*, Kamis (15/4).

Secara moderat, riset INACA dan Unpad menunjukkan perkiraan jumlah penumpang penerbangan domestik akan kembali normal pada Desember 2024. Skenario pulih secara moderat itu ditopang dengan kecepatan proses vaksinasi Covid-19, seperti yang tengah berjalan saat ini.



Hariyadi Sukamdani

“Berdasarkan skenario moderat, pada Desember 2019 total penumpang domestik 79,02 juta, kemudian Desember 2020 jadi 35,41 juta, dan *rebound* bulan Desember 2024. Tapi kami lihat pergerakan sudah mulai ada pada 2022,” papar Yayan.

Yayan menuturkan, berdasarkan hasil riset, ternyata peningkatan volume penumpang pesawat itu bukan

hanya berdasarkan keleluasaan dan kenaikan mobilitas saja, tapi juga adaptasi yang baik terhadap protokol kesehatan.

“Selama maskapai memperoleh *trust* masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan dan daerah yang bersangkutan, baik destinasi dan originnya itu aman, maka itu yang meningkatkan permintaan penumpang domestik,” ucap Yayan.

Adapun untuk penerbangan internasional, kata Yayan, secara moderat diprediksi pulih pada tahun 2026 atau jumlahnya hampir kembali ke posisi tahun 2019 yang sebanyak 36,59 juta penumpang.

“Sedangkan untuk skenario optimistis, kami lihat jumlahnya itu hampir mirip di sini pada tahun 2026 tapi mungkin dari sisi bulannya dia lebih cepat dibandingkan dengan skenario moderat,” papar dia.

Sedangkan Pakar dan Peneliti Hukum Penerbangan dan Pembiayaan Pesawat Udara Unpad Prita Amalia memprediksi sektor penerbangan mulai membaik pada awal tahun 2022 untuk domestik dan akhir tahun 2023 untuk internasional, namun hal itu tak terlepas dari dukungan pemerintah.

“Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan dukungan

pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi sebagai strategi pemulihan sektor penerbangan, seperti bantuan fiskal untuk pengurangan beban operasional,” kata Prita Amalia yang juga Tim Riset Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia/INACA dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengungkapkan, satu tahun lebih satu bulan, Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan operator untuk memalasi dampak pandemi.

Dampak pandemi ini, kata dia, sangat berat bagi industri penerbangan. Pada Maret 2020 tercatat jumlah penerbangan nasional turun hingga 70% dan sekitar 65% angkutan kargo turun, yakni dari 1,1 juta ton menjadi 429.000 ton.

Kunci Pemulihan

Menanggapi hasil riset INACA dan Unpad itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kunci dari pemulihan penerbangan sangat tergantung bagaimana kecepatan semua pihak dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 ini.

“Pandemi ini menjadi *focal point*

kita untuk mengatasi karena apa pun stimulus dan sebagainya itu tidak akan efektif kalau pandemi ini tidak bisa kita atasi,” jelas Hariyadi.

Terkait vaksinasi, kata dia, jika melihat apa yang terjadi di Israel dan Inggris di mana jumlah penduduk yang divaksinasi sudah lebih dari 50% populasi, ada korelasi dengan penurunan kasus positif baru dan perekonomian mulai bergerak pulih.

“Chili ada di nomor 3 jumlah penduduk yang sudah divaksinasi tapi korelasinya masih belum terlihat. Jadi, di sini antara vaksin dengan penurunan kasus belum terlihat karena masih di bawah 40%,” ungkap Hariyadi.

Lalu untuk Indonesia, lanjut dia, saat ini baru sekitar 10 juta orang mendapatkan satu dosis suntikan vaksin dan dua kali dosis suntikan sebanyak 5,3 juta orang. Adapun target penduduk yang akan divaksin adalah 181,5 juta orang dengan sekitar 426 juta dosis.

“Jadi, kalau kita melihat seperti ini, saya melihatnya ke arah yang moderat prediksinya. Tapi target kita untuk berikan vaksin terhadap 181,5 juta orang di mana perlu 426 juta dosis dan sekarang kenyataan seperti ini. Pemerintah sendiri juga masih menghadapi kesulitan bagaimana untuk mendatangkan atau suplai 426 juta dosis itu,” jelas dia.

Antara



Antisipasi Arus Mudik Awal

Petugas kesehatan melakukan tes cepat antigen kepada warga di Rest Area KM 487 B, Tol Boyolali-Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/4/2021). Selain melakukan tes cepat antigen, kegiatan dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas Candi 2021 tersebut bertujuan sebagai tindakan awal menghambat terjadinya arus mudik awal saat puasa untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kemenhub Gandeng ASDP Optimalisasi Pelabuhan di KSPN Danau Toba

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menjalin kerja sama pemanfaatan operasional pelabuhan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Kerja sama tersebut dituangkan dalam *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati di Jakarta, Kamis (15/4).

Budi Setiyadi menyampaikan bahwa optimalisasi barang milik negara (BMN) dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun kerja sama pemanfaatan (KSP) pada BMN kepada pihak lain. Skema kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna angkutan pelabuhan di wilayah KSPN Danau Toba.

“Kami juga berharap kehadiran

PT ASDP selain untuk mengelola prasarana dengan baik dalam aspek pelayanan, diharapkan dapat memberikan nilai lebih untuk meningkatkan kualitas masyarakat di sekitar Danau Toba, khususnya di beberapa dermaga yang akan dikerjasamakan. Bisa dilakukan dengan menarik merek-merek lokal di sana,” kata Budi dalam sambutannya kemarin.

Budi menuturkan, Ditjen Hubdat maupun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka pengembangan pelabuhan di KSPN Danau Toba.

“Kami dan PT ASDP akan menyusun perjanjian setelah mendapat persetujuan. Kami juga akan melakukan sosialisasi kepada petugas, pedagang, dan masyarakat sekitar pelabuhan di KSPN Danau Toba terkait dengan adanya pembangunan pemanfaatan BMN ini,” ujarnya.

Di samping itu, kata Budi, akan dilakukan juga pengawasan dan evaluasi pemanfaatan BMN dengan mekanisme kerja sama pemanfaatan operasional pelabuhan di KSPN Danau Toba di antara Ditjen Hubdat dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Sementara itu, Dirut PT ASDP Ira Puspawati menilai kerja sama ini merupakan sebuah hal yang membanggakan karena merupakan model kerja sama yang baru dan bisa menjadi contoh untuk kerja sama selanjutnya.

“Melalui kerja sama ini, kami berperan dalam dua hal yang terkait dengan pariwisata, yaitu akses dan fasilitas. Kami memiliki target untuk meningkatkan jumlah wisatawan menjadi 1 juta orang dari yang semula menurut Badan Otorita Pariwisata Danau Toba jumlah wisatawan hanya sekitar 350 ribu sampai dengan tahun 2019,” kata Ira.

Ira juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ditjen Hubdat karena telah diberikan kepercayaan dalam melakukan pengembangan pelabuhan di KSPN Danau Toba.

“Kami dari PT ASDP sangat berterimakasih karena diberikan kepercayaan. Kami adalah Lembaga Badan Usaha Milik Negara yang dilahirkan oleh Kemenhub dan sudah seharusnya mendukung program Kemenhub. Kami juga siap menerima seluruh saran dari Kemenhub,” papar dia. **(tm/ant)**

Jasa Marga Koordinasi dengan Kepolisian Atasi Derek Liar

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad langsung berkoordinasi dengan petugas di lapangan dan Patroli Jalan Raya (PJR) Kepolisian terkait adanya laporan pemaksaan oleh oknum derek liar terhadap pengguna jalan tol.

“Dengan adanya laporan ini kami langsung berkoordinasi dengan petugas Jasa Marga dan PJR di lapangan untuk melakukan pengecekan dan penindakan jika terbukti ditemukan pelanggaran oleh oknum derek liar,” ujar GM Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Nasrullah dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut dia, untuk mendapatkan layanan derek resmi Jasa Marga, pengguna jalan dapat menghubungi *Call Center* Jasa Marga di nomor 14080 atau melalui aplikasi Travoy 3.0

untuk bantuan dan informasi jalan tol. Ia mengatakan derek resmi Jasa Marga menggunakan kendaraan dengan identitas korporasi, seperti warna, logo perusahaan, hingga keterangan derek resmi dan nomor *call center*. Selain itu, fitur derek *online* dapat digunakan untuk pemesanan derek dan pemantauan progres penderekan secara *real time*. Saat ini derek *online* baru dapat digunakan di Tol Jagorawi, Tol Dalam Kota Jakarta, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Tangerang, Tol Prof Dr Ir Soedjatmo, JORR Seksi E, dan Tol Cipularang-Padaleunyi.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan akibat kejadian ini, dan kami mengimbau kepada pengguna jalan yang membutuhkan layanan derek resmi untuk menghubungi Call Center Jasa Marga 24 jam di 14080.

Selain melalui call center, pengguna jalan juga dapat menggunakan aplikasi Travoy 3.0 untuk bantuan dan informasi seputar tol. Aplikasi ini memiliki fitur derek online dan fitur *panic shake*,” kata Nasrullah.

Selain itu, dia juga memohon partisipasi aktif pengguna jalan dalam melaporkan kendaraan derek yang dicurigai sebagai derek liar melalui *call center* Jasa Marga di nomor 14080. Sebelumnya beredar video pemaksaan kepada pengemudi truk oleh oknum derek liar di media sosial. Berdasarkan informasi pada video yang beredar, oknum derek liar yang memaksa untuk menarik kendaraan truk tersebut berada di sekitar KM 02-03 Jalan Tol Dalam Kota arah Jakarta, atau sebelum Gerbang Tol Halim, diduga kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu (14/4). **(tm/ant)**



JAPFA
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA DAN RUPS TAHUNAN
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) (“RUPS”) pada:

Hari/tanggal : Kamis, 15 April 2021

Waktu : Pukul 10.18 s.d 10.33 WIB – RUPSLB
Pukul 11.40 s.d 11.44 WIB – RUPST

Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park, Podomoro City,
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
- Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Herry Wibowo
- Wakil Direktur Utama : Bpk. Bambang Budi Hendarto
- Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
- Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 9.981.439.392 saham atau mewakili 85,62% dari 11.657.690.601 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS dimulai dengan RUPSLB, dengan agenda yaitu:

“Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”.

Undi agenda RUPSLB tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 15 April 2021 No. 87, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebanyak 100 suara “Abstain”, sebanyak 1.078.273.439 suara “Tidak Setuju”, sehingga total suara “Setuju” 8.903.165.953 suara atau merupakan 89,20% atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, sehingga Keputusan RUPSLB adalah:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali ketentuan anggaran dasar Perseroan, untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020/2014, dengan perubahan (bila ada) yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Untuk keperluan tersebut menyatakan/menentukan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPSLB dilanjutkan dengan RUPST.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 10.086.435.206 saham atau mewakili 86,52% dari 11.657.690.601 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), dengan Agenda, yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk Agenda RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 15 April 2021 No. 88, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Agenda Pertama: Sebanyak 6.955.500 suara “Abstain”, sebanyak 500 suara “Tidak Setuju”, sehingga total suara “Setuju” 10.086.434.706 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Pertama adalah:

- (i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pwntantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Februari 2021, Nomor 001172-102/2021, dengan pendapat wajar dalam skema audit, dan hal yang material; (ii) menyetujui hal yang bersangkutan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et décharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Agenda Kedua: Sebanyak 1.400 suara “Abstain”, sebanyak 4.001.700 suara “Tidak Setuju”, sehingga total suara “Setuju” 10.082.433.506 suara atau merupakan 99,96% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Kedua adalah:

- a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp 916.711.205.406,- (sembilan ratus enam belas milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), digunakan sebagai berikut:
 - i. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - ii. sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
 - iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Agenda Ketiga: Sebanyak 1.400 suara “Abstain”, sebanyak 339.387.800 suara “Tidak Setuju”, sehingga total suara “Setuju” 9.747.047.406 suara atau merupakan 96,64% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Ketiga adalah:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2021, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Keempat: Sebanyak 1.400 suara “Abstain”, sebanyak 1.000.640.939 suara “Tidak Setuju”, sehingga suara total “Setuju” 9.085.794.267 suara atau merupakan 90,08% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Keempat adalah:

- a. Mengangkat Anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022, dengan susunan sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
 - Komisaris : Bpk. Hendrick Kolonas
 - Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
 - Direktur Utama : Bpk. Handjo Santosa
 - Wakil Direktur Utama : Bpk. Tan Yong Nang
 - Direktur : Bpk. Antonius Harwanto Suryo Sembodo
 - Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
 - Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya
- b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Agenda Kelima: Sebanyak 1.400 suara “Abstain”, sebanyak 118.904.100 suara “Tidak Setuju”, sehingga total suara “Setuju” 9.967.531.106 suara atau merupakan 98,82% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan Agenda Kelima adalah:

Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

Jadual Pembagian Dividen:

- Pengumuman di Lantai Bursa	: 16 April 2021
- Cum Dividen pada : - Pasar Reguler dan Negosiasi	: 23 April 2021
	: 27 April 2021
- Ex Dividen pada : - Pasar Reguler dan Negosiasi	: 26 April 2021
	: 28 April 2021
- Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	: 27 Mei 2021
- Tanggal Pembayaran	: 7 Mei 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang namanya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: PT ADMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana Boutique Centre, Kirana Ventura II Blok F3 No. 5, Kelapa Bading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974.6222, Fax. (021) 2928.9861 (“BAE”), untuk memberitahukan kepada BAE mengenai penyetoran nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling lambat tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk bea perusahaannya di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada BAE;
 - b. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - c. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 16 April 2021
Direksi Perseroan

Investor Daily Indonesia, Hal/Page : 7